

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi PPN

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Ini bukan definisi resmi tentang PPN. Kita tidak menemukan definisi PPN dalam Pasal-Pasal UU PPN 1984. Kalimat itu ada dalam penjelasan UU PPN 1984. Juga tidak ada definisi tentang apa yang dimaksud dengan konsumsi. Tetapi kita memulai pembahasan tentang PPN dari itu.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah yang pajak dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setup pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dan produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Yang menjadi objek pajak adalah konsumsi barang dan jasa sedangkan subjek pajak dalam arti pemikul beban pajak adalah konsumen. Dalam sudut pandang PPN, konsumenlah yang dianggap memiliki kemampuan untuk dibebani

pajak atas konsumsi barang maupun jasa.

2.2. Objek Pemungutan PPN

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau selanjutnya disebut UU PPN 1984.

Adapun objek PPN adalah sebagai berikut : (pasal 4 ayat 1)

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

23. Pembayaran yang tidak dipungut PPN

Pembayaran PPN dilakukan oleh bendahara, Haman terdapat beberapa pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPN. Pembayaran yang dikecualikan tersebut antara lain:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak RP 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah.
2. Batas jumlah pembayaran sebesar RP 1.000.000 termasuk PPN
3. PPN yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp 1.000.000 dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.
4. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
5. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku, dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti:
 - A. Pembayaran untuk penyerahan BBM oleh Pertamina
 - B. Pembayaran atas rekening telepon
 - C. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 pasal 4a yaitu atas penyerahan BKP dan atas JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - D. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

2.4. Barang Kena Pajak

Barang kena pajak adalah barang berwujud menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- A. Minyak mentah
- B. Panas bumi
- C. Asbes
- D. Kalsit
- E. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
- F. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
- G. Beras
- H. Gabah
- I. Jagung
- J. Sagu
- K. Kedelai
- L. Uang, emas batangan, dan surat berharga

2.5. Jasa Kena Pajak

Jasa kena pajak adalah setup kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dan pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa berikut:

- A. Jasa keuangan
- B. Jasa keagamaan
- C. Jasa pendidikan
- D. Jasa tenaga kerja

2.6. Mekanisme Pelunasan PPN ke Kas Negara

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh penjual, dan dinamakan Pajak Keluaran, tidak seluruhnya disetor ke Kas negara. Sebagian merupakan hak penjual. Yang merupakan hak penjual adalah PPN yang dibayar atas perolehan barang atau jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan dikenal dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Selisih lebih Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan inilah yang wajib disetor ke Kas Negara. Mekanisme seperti ini merupakan mekanisme umum pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan pada setup Masa Pajak. Ketentuan umumnya sebagaimana diatur dalam

Pasal 9 UU PPN 1984 antara lain menyatakan:

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
2. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan;
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak,
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

2.7. Bukan Objek PPN sebagai berikut :

Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
 - a. Minyak mentah (crude oil)
 - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - c. Panas bumi
 - d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit,

granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, mangan, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit

- e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

- a. Beras, Gabah, Sagu, Jagung, Kedelai;
- b. Garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium
- c. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
- d. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
- e. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses, didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi dikupas, dipotong, diiris, di grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
- f. Buah-buahan yaitu buah segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris dan dikemas atau tidak dikemas.

- g. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Uang, emas batangan, dan Surat berharga

4. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

2.8. Ada 2 subyek PPN yaitu:

Adapun subjek dari PPN ini ada 2 (dua), yaitu

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dan luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dan Pengusaha Kena, Pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Bukan Pengusaha Kena Pajak atau bukan PKP adalah orang atau badan yang

mengimpor BKP, memanfaatkan jasa atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

2.9. Jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman Surat dengan perangko
4. Jasa asuransi
5. Jasa keuangan
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat Man
10. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

17. Jasa bogs atau katering.

2.10 Faktur Pajak yaitu:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Sesuai dengan **Peraturan Direktur Jendral Pajak,**

Nomor: 65/PJ/2010, yang memuat bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan, atau
- d. Saat PKP rekanan penyampaian tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN.

2.11 Dasar Pemungutan PPN

Dasar pemungutan PPN yakni berdasarkan jumlah pembayaran baik dalam bentuk uang muka, pembayaran sebagian, maupun pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh Pemungut PPN kepada PKP penyedia barang/jasa. Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN tersebut, termasuk PPN yang terutang tanpa memperhatikan apakah dalam kontrak menyebutkan ketentuan pemungutan PPN maupun tidak.

2.12 Tata Cara Pemungutan

PKP selaku penyedia barang/jasa pemerintah mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada faktur pajak, apabila dalam penyerahan BKP tersebut terdapat PPn BM terutang.

1. Faktur pajak dibuat dalam rangkap tiga:
2. Lembar pertama untuk bendahara
3. Lembar kedua untuk arsip PKP rekanan/penyedia barang/jasa pemerintah
4. Lembar ketiga untuk KPP melalui bendahara pemerintah

Surat setoran pajak dibuat oleh PKP rekanan dengan nama, alamat dan NPWP dari PKP rekanan/penyedia barang jasa pemerintah yang bersangkutan, Haman ditandatangani oleh bendahara selaku pemungut pajak yang bertindak atas nama PKP rekanan/penyedia barang/jasa pemerintah.

2.13 Tata Cara Penyetoran

Penyetoran PPN dilakukan dengan SSP dibuat dalam rangkap 5 atas nama penyedia barang/jasa pemerintah dan ditandatangani oleh bendahara:

1. Lembar pertama untuk PKP penyedia barang jasa
2. Lembar kedua untuk KPP melalui KPPN
3. Lembar ketiga untuk PKP penyedia barang/jasa guns dilampirkan pada SPT
mass PPN
4. Lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos atau untuk pertinggal
KPPN

5. Lembar kelima untuk arsip bendahara

Pada setiap Lembar faktur pajak wajib dibubuhi cap "disetor tanggal....." dan ditandatangani bendahara. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.

2.14 Karakteristik PPN

1. Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
2. Multi tahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi.
3. Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.
4. Menghindari pengenaan pajak berganda.
5. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

2.15 Jenis Setoran PPN Dalam Negeri

- a. Setoran Masa PPN Dalam Negeri
- b. Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar daerah
- c. Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean.
- d. Setoran Kegiatan Membangun Sendiri.
- e. Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
- f. STP PPN Dalam Negeri

- g. Pembayaran atas surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- h. PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidakbenaran
- i. PPN dalam negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana.

2.16 Jenis Setoran PPN Impor

- a. Setoran Masa PPN Impor
- b. Pembayaran pendahuluan SKP PPN Impor
- c. Pembayaran atas surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- d. PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran
- e. PPN Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana